



Dana Hibah RW Meningkatkan

■ Yulianingsih

Pemkot mengucurkan hibah untuk penataan administrasi RW sebesar Rp 6 miliar.

YOGYAKARTA — Pembangunan kewilayahan di Kota Yogyakarta pada 2014 ini terus ditingkatkan. Bukan hanya aspek kegiatan fisik yang dipusatkan di wilayah semata, namun juga kegiatan peningkatan administrasi di wilayah.

Tahun ini, Pemkot Yogyakarta mengucurkan dana hibah untuk program penataan administrasi di setiap rukun warga (RW) sebesar Rp 6 miliar. Dana ini naik 100 persen dari 2013 lalu.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, mengatakan dana tersebut dikucurkan untuk 615 RW di Kota Yogyakarta. "Masing-masing

RW memperoleh Rp 10 juta," ujarnya, Jumat (8/8).

Dana itu akan digunakan untuk pemenuhan administrasi RW dan pembelian kelengkapan sekretariat RW. Tahun lalu dana tersebut hanya Rp 5 juta per RW. Sebagian RW saat ini sudah menerima bantuan hibah ini. Namun masih banyak yang baru mengajukan pencairan.

Proses pengajuan tidak sekadar menyerahkan proposal, melainkan wajib menyertakan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun lalu.

Menurutnya, meski diberikan berturut-turut selama dua tahun ini, namun diakuinya hal itu tidak menyalahi aturan. Pasalnya kebijakan hibah bagi RW tersebut sudah dicantumkan dalam perda. "Kami sudah konsultasi ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), selama diatur dalam perda maka boleh diberikan lagi," katanya.

Hanya saja, mulai tahun ini pengucuran hibah tidak diberikan tunai melainkan melalui

transfer ke rekening RW di Bank Jogja. Oleh karena itu, tiap RW harus membuka rekening terlebih dahulu. Hal ini merujuk Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta.

Langkah itu, untuk mempermudah pengawasan terkait pencairan dana. Sehingga jika ada pergantian pengurus RW karena suatu hal yang mendesak, maka pencairan dana tidak akan mengalami kesulitan.

Selain pula barang-barang inventaris yang akan dibeli harus sesuai dengan kebutuhan atau yang tertera dalam proposal. Barang inventaris yang bisa dibeli melalui dana tersebut adalah tikar, kursi, mesin ketik, dan peralatan kantor atau keperluan bersama.

Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta justru belum bisa mengucurkan program bantuan sosial khusus dari Pemda DIY untuk warga miskin di Kota Yogyakarta. Ini lantaran hasil verifikasi ter-

hadap sasaran penerima yang diserahkan ke Pemda DIY, belum juga mendapat jawaban.

Kepala Dinsosakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, mengatakan dari hasil verifikasi pihaknya menemukan ada 133 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak bisa menerima bansos khusus.

"Tahun ini, pemkot mendapatkan kuota 1234 RTS. Masing-masing RTS sudah ditetapkan nama dan alamat. Sedangkan 133 RTS yang dinyatakan tidak bisa menerima, sebagian besar karena tahun lalu sudah pernah menerima. Ini yang kita tunggu jawabannya," katanya.

Selain sudah menerima, ada di antara RTS tersebut yang sudah pindah domisili dan ada yang meninggal. Setiap RTS rencananya akan memperoleh bantuan Rp 1 juta.

"Kalau sudah ada jawaban dari pemda baru kita kucurkan," ujarnya. Dana itu diharapkan bisa digunakan untuk menambah modal usaha. ■ ed@yusufassidiq.com

- | | |
|--------------------|--|
| Instansi | |
| 1. KPMP | |
| 2. Dinsosakertrans | |
| 3. Dinsosakertrans | |
| 4. | |
| 5. | |

- ✓ Netral
- ✓ Biasa

- | | |
|------------------|--|
| Tindak Lanjut | |
| Untuk Ditanggapi | |
| Untuk Diketahui | |
| Jumpa Pers | |

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat			

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005